

Evaluasi Program Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang

Giska Yulia Andani¹, Nora Eka Putri²

¹²Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang
e-mail: giskaaayulia@gmail.com¹, noraekaputri@fisunp.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan mengevaluasi program KB dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Dinas Sosial PPKBP3A Kota Padang Panjang. Penelitian ini menerapkan pendekatan quasi-kualitatif dengan menggunakan metode *simple research design*(SRD). Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian terlihat sejauh ini Program KB di Kota Padang Panjang telah cukup berhasil dalam mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk, hal ini didukung oleh beberapa faktor pendukung. Namun dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana tersebut masih ditemukan juga beberapa faktor penghambat. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan terus-menerus serta evaluasi efektivitasnya, sambil terus berupaya menjaga dan meningkatkan program agar capaiannya dapat dipertahankan dan ditingkatkan ke depannya. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa evaluasi program berencana keluarga berencana sudah dilaksanakan dengan baik sesuai indikator penilaian program tersebut.

Kata kunci: *Evaluasi, Laju Pertumbuhan, KB, Kelahiran*

Abstract

This research aims to evaluate the Family Planning (KB) program in managing the rate of population growth at the Social Welfare Office of PPKBP3A in Kota Padang Panjang. It adopts a quasi-qualitative approach using the Simple Research Design (SRD) method. The methods of gathering data encompass observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the Family Planning Program in Kota Padang Panjang has been quite successful in controlling population growth, supported by several facilitating factors. Nevertheless, certain obstacles in executing the Family Planning Program were also pinpointed. Therefore, continuous monitoring and evaluation of its effectiveness are necessary, while efforts should be made to maintain and enhance the program's achievements in the future. The research concludes that

the assessment of the family planning program has been effectively conducted in line with the program's assessment standards.

Keywords : *Evaluation, Growth Rate, Family Planning, Birth*

PENDAHULUAN

Di Indonesia ingginya laju pertumbuhan penduduk juga akan berpengaruh dalam masalah pembangunan. Dari sudut pandang kebijakan pembangunan, jumlah penduduk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap permasalahan pembangunan suatu daerah. Data populasi penduduk memiliki peran yang signifikan dalam proses perencanaan pembangunan. Semakin banyaknya informasi penduduk yang tersedia maka akan semakin memudahkan perencanaan pembangunan. (Larasati et al., 2019)

Tingginya pertumbuhan populasi penduduk dan ketidakseimbangan struktur usia penduduk di beberapa provinsi menjadi tantangan utama dalam konteks kependudukan dan perencanaan KB nasional. Pertumbuhan populasi penduduk yang relatif tinggi ini di sisi disebabkan oleh masih tingginya angka kelahiran dan di sisi lain karena turunnya angka kematian secara cepat. (Admaja et al., 2019)

Salah satu kebijakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ialah Program KB. Tujuan Program KB adalah untuk mendukung kebahagiaan keluarga kecil dengan mengatur jumlah anak, mengatur jarak dan usia antar kehamilan, serta melalui promosi, perlindungan, dan bantuan yang sesuai kebutuhan guna membentuk keluarga yang berkualitas. Untuk mencapai target ini, Pemerintah perlu terlibat dalam mengeluarkan regulasi mengatur kelahiran sambil tetap memperhatikan hak-hak individu. Secara umum, program KB memiliki tujuan untuk mengarahkan pembentukan keluarga dengan jumlah anggota yang sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi, dengan mengatur pola kelahiran anak, sehingga keluarga dapat mencapai tingkat kebahagiaan, kesejahteraan, dan memenuhi kebutuhan hidupnya. (UU No. 52 Tahun 2009).

Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) juga diatur sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 mengenai Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, serta Sistem Informasi Keluarga. Pembangunan dan pertumbuhan keluarga adalah upaya yang direncanakan untuk mencapai pertumbuhan penduduk yang stabil serta meningkatkan kualitas penduduk dalam semua aspek kehidupan. Pembangunan keluarga bertujuan untuk menciptakan keluarga yang memiliki kualitas baik dan tinggal dalam lingkungan yang sehat.

Kota Padang Panjang telah menerapkan Konsep Keluarga Bencana sebagai bagian dari upaya penanganan isu kependudukan. Namun, dalam Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 Dinas Sosial PPKBP3A Kota Padang Panjang ditemukan belum optimalnya pengendalian penduduk di Kota Padang Panjang. Permasalahan tersebut disebabkan oleh yaitu :

Pertama, angka pertumbuhan penduduk di Kota Padang Panjang yang masih tinggi. Selama tahun 2019-2020, dimana jumlah penduduk Kota Padang Panjang bertambah sebanyak 3.317 orang yang menunjukkan laju pertumbuhan penduduk sebesar 4,48%. Tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi tercatat di Kecamatan Padang Panjang Barat sebesar 9,64%, sementara di Kecamatan Padang Panjang Timur sebesar -0,86%.

Tabel 1. Laju Pertumbuhan Penduduk Padang Panjang 2019-2020

| Kecamatan (Subdistrict) | Penduduk (Population) | Laju Pertumbuhan Penduduk Tahunan 2019-2020 (Annual Population Growth Rate (%) 2019-2020) |
|------------------------------------|----------------------------------|--|
| Padang Panjang Barat | 32.160 | 9,64 |
| Padang Panjang Timur | 24.151 | -0,86 |
| Padang Panjang | 56.311 | 4,88 |

Sumber : (Padang Panjang dalam Angka 2021)

Kedua, masih tingginya *unmet need*. *Unmet need* adalah situasi di mana pasangan usia subur (PUS) menginginkan jenis kontrasepsi tertentu namun tidak tersedia, sehingga mereka memutuskan untuk tidak menggunakan metode kontrasepsi. Masyarakat Kota Padang Panjang khususnya wanita tidak mau ikut program KB karena beberapa alasan seperti tidak cocok ke badan, takut merubah bentuk fisik, takut susah mendapatkan anak, dan lain- lain.

Ketiga, Partisipasi pria dalam program KB masih rendah. Berdasarkan hasil wawancara, terungkap bahwa pemahaman tentang KB masih terbatas di kalangan masyarakat dan tokoh agama serta tokoh masyarakat. Belum semua suami atau laki-laki mengetahui tempat pelayanan KB, karena kebanyakan dokter kandungan atau bidan hanya menawarkan pelayanan KB untuk perempuan. Laki-laki umumnya tidak mengetahui adanya dokter atau tenaga medis yang menyediakan pelayanan KB untuk mereka. Selain itu, alat kontrasepsi yang disediakan pemerintah kebanyakan ditujukan untuk wanita, seperti pil, IUD, susuk, suntik, dan tubektomi, sehingga masyarakat, terutama pria, menganggap bahwa KB adalah tanggung jawab wanita.

Salah satu tindakan dalam mengatasi isu pertumbuhan penduduk adalah melalui kebijakan KB. Dinas Sosial PPKBP3A Kota Padang Panjang bertanggung jawab sebagai pelaksana teknis dalam program KB di Kota Padang Panjang, Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji terkait pelaksanaan pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program KB. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan berjudul "Evaluasi Program KB dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Dinas Sosial PPKBP3A Kota Padang Panjang".

METODE

Penelitian ini adalah kualitatif semu (quasi-kualitatif) yang menerapkan metode simple research design (SRD) sebagaimana dijelaskan oleh Bungin (2020), yang terdiri dari lima tahap yaitu *social context and research question, literatur review, research methods and data collection, data analysis, reporting* (Bungin, 2020). Metode

pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara itu, analisis data dilakukan melalui teknik reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Evaluasi program KB dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Dinas Sosial PPKBP3A Kota Padang Panjang dianalisis menggunakan model Evaluasi Kebijakan berdasarkan Bridgman & Davis (2000:130) mengevaluasi sebuah kebijakan publik secara umum (Hidayat et al., 2021):

1. Indikator Input

Indikator input mengevaluasi ketersediaan sumber daya dan materi dasar yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan, termasuk tenaga kerja, keuangan, atau fasilitas pendukung. Dalam hal ini, fokus indikator inputnya dibatasi pada tenaga kerja yang ada.

Kota Padang Panjang saat ini memiliki jumlah PKB atau PLKB yang sudah mencukupi. Terdapat 82 orang PPKBD dan Sub PPKBD yang aktif dalam pelaksanaan Program KB di wilayah tersebut. Namun, untuk kualitas SDM yang tersedia kebanyakan adalah tenaga penyuluh yang sudah lanjut usia.

Selain itu, upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan KB dilakukan secara bertahap, tergantung pada skala prioritasnya. Saat ini, PKB/PLKB menggunakan smartphone yang tersedia sebagai alat kerja untuk keperluan pendataan. Namun demikian, smartphone yang tersedia belum mencapai standar kerja yang diperlukan, maka tidak maksimalnya dukungan untuk pendataan keluarga. Selain itu, belum ada balai khusus untuk Penyuluh KB; saat ini, kegiatan tersebut masih bergantung pada Dinas terkait yang tidak secara khusus disiapkan untuk kegiatan KB. Disarankan untuk mendirikan Sekretariat Khusus Penyuluh KB yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan KB, seperti penyuluhan, pertemuan kerja, diskusi antar warga, dan kegiatan lainnya. Selain itu, keperluan dalam program penyuluhan kelompok masih terbatas, termasuk permainan dan materi edukatif bagi kelompok Tri Bina (BKB, BKR, BKL).

2. Indikator proses

Indikator proses mengacu pada mengenai cara kebijakan dijalankan melalui penyediaan layanan secara langsung ke masyarakat. Hal itu berkaitan dengan penilaian efektivitas dan efisiensi metode atau alat yang dipergunakan dalam mengimplementasikan kebijakan yang tertentu. Indikator proses dalam konteks penelitian ini mencakup eksekusi aktivitas Program KB seperti advokasi, komunikasi, serta penyampaian edukasi dan informasi akurat terkait dengan program tersebut.

Dalam kegiatan Program Keluarga Berencana mengenai penyebaran informasi terkait program Keluarga Berencana adalah dilakukan melalui berbagai media, termasuk sosialisasi langsung seperti penyuluhan di lapangan, media cetak seperti pamflet dan brosur, program siaran radio, dan media sosial seperti Instagram. Tujuannya adalah untuk mencapai berbagai lapisan masyarakat dan menyampaikan

informasi yang relevan serta bermanfaat. Pendekatan ini sangat bervariasi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta konteks masyarakat tertentu.

Dalam kegiatan pembinaan keluarga untuk meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan, fokus ditekankan pada penyuluhan kelompok Tribina dan Persatuan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (PPKA). Setiap kelompok pembinaan telah membentuk Kelompok Bina Keluarga Balita dan satu Kelompok Lansia. Program tersebut biasanya dilaksanakan secara teratur, minimal satu kali dalam sebulan.

3. Indikator *outputs* (keluaran)

Indikator *outputs* keluaran menitikberatkan pada hasil dari suatu sistem atau proses kebijakan publik. Contohnya yaitu jumlah orang yang berhasil berpartisipasi dalam program tertentu.

Di Kota Padang Panjang sendiri partisipasi masyarakat sudah cukup bagus dalam mengikuti program Keluarga Berencana. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan atas kemauan sendiri tanpa perlu paksaan dari pihak lain. Namun diperlukan peningkatan dalam penyuluhan yang diselenggarakan serta peningkatan dalam pelayanan Keluarga Berencana agar mampu menjangkau dan mengakses peserta Usia Subur (PUS) yang belum terlibat, serta melayani mereka agar menjadi peserta KB aktif.

4. Indikator *outcomes* (hasil)

Indikator hasil (*outcomes*) menitikberatkan pada mengenai dampak dan konsekuensi yang dirasakan oleh masyarakat umum atau pihak terkait kebijakan tersebut. *Outcome* yang diinginkan dari program KB adalah menciptakan keluarga yang sehat, sejahtera, dan memiliki kontrol atas jumlah anak yang mereka miliki, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka serta meningkatkan pembangunan secara keseluruhan dalam suatu masyarakat. Sejauh ini program KB di Kota Padang Panjang sudah cukup baik dalam mengendalikan jumlah penduduk, namun penting untuk terus memantau dan mengevaluasi efektivitasnya serta terus melakukan upaya pemeliharaan dan peningkatan agar pencapaian tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.

SIMPULAN

Dapat diambil kesimpulan bahwa evaluasi program KB dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Dinas Sosial PPKBP3A Kota Padang Panjang menggunakan model Evaluasi Kebijakan berdasarkan Bridgman & Davis (2000:130) yaitu :1) Kota Padang Panjang saat ini memiliki jumlah PKB atau PLKB yang sudah mencukupi dalam hal jumlah, namun terdapat beberapa permasalahan terkait dengan kualitas SDM, sarana dan prasarana yang tersedia. 2) Dalam penyebaran informasi terkait Program Keluarga Berencana sudah dilakukan melalui berbagai media, termasuk sosialisasi langsung seperti penyuluhan di lapangan, media cetak seperti pamflet dan brosur, program siaran radio, dan media sosial seperti Instagram. 3) Di Kota Padang Panjang sendiri partisipasi masyarakat sudah cukup bagus dalam mengikuti program Keluarga Berencana. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan

yang diselenggarakan atas kemauan sendiri tanpa perlu paksaan dari pihak lain. 4) Sejauh ini program KB di Kota Padang Panjang sudah cukup baik dalam mengendalikan jumlah penduduk, namun penting untuk terus memantau dan mengevaluasi efektivitasnya serta terus melakukan upaya pemeliharaan dan peningkatan agar pencapaian tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Admaja, M. F., Kalalinggi, R., & Alaydrus, A. (2019). *Peran Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB) Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Kota Samarinda*. 7(2), 983–994.
- Burhan Bungin. (2020). *Post-Qualitative Social Research Methods:Kuantitatif-Kualitatif-Mix Methods Positivism - PostPositivism - Phenomenology - Postmodern Filsafat, Paradigma, Teori, Metode dan Laporan*. Kencana Prenamedia Group.
- Hidayat, T., Kusuma, A. R., & Paselle, E. (2021). *Evaluasi program kampung keluarga berencana di kecamatan sangatta utara kabupaten kutai timur*. 9(1), 1–11.
- Larasati, Muda, I., Batubara, B. M., & Suharyanto, A. (2019). Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk *The Role of the Office of Population and Family Planning Control in Controlling Population Growth*. Perspektif, 8(1), 13–18.
- Padang Panjang dalam Angka 2021
- Revisi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang
- Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga